

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang tentunya memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, tentunya hal ini adalah bagian hak asasi sekaligus hak konstitusional setiap rakyat. Mengenai upaya perlindungan dan perwujudannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UUPPLH. Perlindungan lingkungan memang patut diperhatikan disamping pengelolaan lingkungan, sehingga norma-norma yang berkaitan dengan hal tersebut mendapat sorotan utama di dalam UUPPLH, mengingat kerentanan yang dapat terjadi terhadap lingkungan hidup serta kualitas hidup masyarakat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pembangunan di dunia kesehatan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat sekaligus mencapai kesehatan yang optimal yang merupakan salah satu komponen

kesejahteraan umum dan terikat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah bagian penting dari kehidupan setiap individu. Dalam perkembangan daerah yang cepat diiringi pula permasalahan dampak pada masalah lingkungan. Perlakuan manusia terhadap lingkungan akan ikut mempengaruhi wajah daerah tersebut, sebaliknya lingkungan juga mempengaruhi perilaku manusia. Lingkungan yang terjaga kebersihannya pasti ikut meningkatkan kualitas hidup. Akan tetapi, baik di negara berkembang atau maju pencemaran lingkungan merupakan masalah yang hampir selalu ada. Masalah lingkungan itu sesungguhnya bukanlah masalah baru.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya didasarkan pada prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah sebab akan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar terhadap negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti bagian dari upaya pembangunan negara. Sehingga pembangunan nasional perlu mementingkan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua pihak dalam masyarakat.

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1 : Umum*, Bandung, Binacipta, 1981, hlm. 187.

Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diiringi dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya baik bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.²

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Lingkungan sehat yang dimaksud tertuang di dalam Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

² Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, KOPMA STKS, Bandung, 1991, hlm. 121.

2009 tentang Kesehatan. Sampah merupakan masalah, baik secara nasional maupun universal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat pengelolaan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Khusus untuk pengelolaan sampah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan mengenai kompensasi akibat dampak negatif dari penanganan sampah yang buruk. Kompensasi yang dimaksud dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

Hidup disekeliling tumpukan sampah setinggi puluhan meter jelas bukan hal mudah. Dari masalah kesehatan hingga keselamatan, banyak bahaya mengintai. Dampak tidak langsung terhadap hal ini yaitu menyebabkan turunnya kualitas lingkungan baik terjadi dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka pendek. L.G Saraswati Putri, Pakar

Lingkungan Universitas Indonesia mengatakan³ kompensasi uang tidak cukup untuk mengatasi dampak lingkungan dari tempat pembuangan sampah, termasuk TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. TPST ini beroperasi pada tahun 1989 dan terletak di 3 Kelurahan yakni Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Ini mencakup area seluas 110,3 hektar, termasuk:

- a. Luas efektif TPST 81,91% dan
- b. Sisanya 18,09 % untuk prasarana seperti jalan masuk, jalan kantor, dan instalansi pengolahan lindi.
- c. Status tanah : milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan sampah dianggap tidak sejalan dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, keberadaan TPST Bantargebang ini menimbulkan polemik dan pertentangan dari warga setempat. Warga merasa keberadaan TPST ini telah menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi perubahan keadaan lingkungan tetapi juga terhadap kondisi kesehatan mereka. Seperti mengalami infeksi saluran nafas walau masih dalam kategori ringan, kemudian terkait masalah pencernaan. Sehingga pemerintah tentu bertanggungjawab terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap warga yang tinggal di kawasan tersebut. Sampah merupakan masalah

³ Warta Ekonomi.co.id, *Uang Tak Cukup Atasi Dampak Lingkungan di Bantargebang, Pesan untuk Pak Anies?*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read200355/uang-tak-cukup-atasi-dampak-lingkungan-di-bantargebang-pesan-untuk-pak-anies>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pada pukul 18.39 WIB.

nasional sehingga perlu dikelola dalam penanganan yang tepat, agar kesehatan masyarakat dan lingkungan dapat terjamin sebagaimana mestinya.

Hal tersebut berdasar undang-undang dan peraturan yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 65 ayat (1), oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 3 seharusnya dapat terpenuhi. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pasti yang dilakukan oleh setiap individu atau pemerintah dan organisasi swasta untuk menjamin keselamatan, pengawasan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat agar sama dengan hak asasi manusia yang ada. Makna yang diungkapkan Andi Hamzah tidak terlepas dari fungsi hukum yang sebenarnya, yaitu melindungi kepentingan dan kesejahteraan manusia.

Perlindungan hukum di suatu negara itu penting, karena dapat melindungi masyarakat dan lingkungan, sehingga menjamin keseimbangan, keberlanjutan, keharmonisan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja diambil dari buku Koesnadi Hardjasoemantri, menyebutkan undang-undang harus mengadopsi pendekatan yang terintegrasi atau menyeluruh untuk mengatur lingkungan manusia dengan baik dan tepat. Hukum lingkungan adalah alat hukum pengelolaan lingkungan. Melalui undang-undang dan peraturan

yang berlaku tentang lingkungan dan pengelolaannya, perlindungan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESEHATAN WARGA DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dari permasalahan kesehatan yang timbul dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana dampak pembuangan sampah di TPST Bantargebang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ?

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum tata lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1983, hlm. 12.

3. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan antara warga dengan pihak TPST Bantargebang tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dari permasalahan kesehatan yang timbul dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui dampak pembuangan sampah di TPST Bantargebang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan antara warga dengan pihak TPST Bantargebang tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh aspek masyarakat. Karena nilai suatu penelitian bergantung pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain, sehingga harapan dari penulisan ini yaitu :

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu meningkatkan penelitian ilmiah dalam proses pengembangan (teori) ilmu hukum.
- b. Diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan keilmuan mengenai perlindungan hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang kesehatan, undang-undang pengelolaan sampah, maupun undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis kedepannya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap kesehatan warga di kawasan TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memahami hasil penelitian ini bersama, bagaimana sebenarnya hukum dalam melindungi masyarakat di kawasan TPST Bantargebang, dan hal ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pada hakikatnya adalah hal yang abstrak, namun dapat bersifat kongkrit dalam perwujudannya. Jika ruang lingkup hukum baru yang dapat diterapkan adalah kebaikan, kebahagiaan maksimum dan lebih sedikit rasa sakit itu dapat dianggap baik.⁵

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan konstitusional ini mengandung arti bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum. Sebab negara hukum mensyaratkan semua tindakan berdasar peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bawah semangat globalisasi telah menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Hal tersebut tercantum di alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, secara hukum yang menyatakan dukungan dan upaya untuk mewujudkan keseimbangan yang penuh menyeluruh, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi

⁵ Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia yang menjadi tonggak dan nafas dalam pembentukan setiap aturan hukum yang dilaksanakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uraian dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat harus memperoleh lingkungan yang sehat tanpa adanya pencemaran. Sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya memperjuangkan hak-hak tersebut, karena akan menjamin keutuhan dari sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hal ini dilakukan agar HAM setiap masyarakat Indonesia dapat terlindungi.

Kesejahteraan sosial sebagaimana diungkapkan oleh Friedlander dalam Sukoco⁶:

(“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”).

⁶ Dwi Heru Sukoco, *Op. Cit*, hlm. 73.

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Adanya peraturan yang berlaku seharusnya dapat membuat masyarakat mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan sehat tidak terkena pencemaran lingkungan. Namun faktanya tidak demikian, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa lingkungan yang sehat tertuang di dalam Pasal 163 ayat (3), yaitu:

1. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
2. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
3. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
 - a. Limbah cair;
 - b. Limbah padat;
 - c. Limbah gas;
 - d. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
 - e. Binatang pembawa penyakit;
 - f. Zat kimia yang berbahaya;
 - g. Kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - h. Radiasi sinar pengion dan non pengion;
 - i. Air yang tercemar;
 - j. Udara yang tercemar; dan
 - k. Makanan yang terkontaminasi.
4. Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto, adalah hasil jumlah semua benda dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan yang kita tempati. Munadjat Danusaputro seorang Ahli Hukum dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran mendefinisikan manusia dan perilakunya di ruang tempat tinggalnya berada mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya.⁷

Hal ini berkaitan terhadap penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Berdasarkan Pasal 7 dan 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan :

⁷ N. H. T Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 4.

- (1) “Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang mengatur:

- (2) “Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.”

Ekosistem suatu lingkungan dari waktu ke waktu dapat berubah jika kelestariannya mengalami pencemaran. Air sebagai sumber daya alam memiliki arti dan fungsi yang sangat vital dalam kehidupan makhluk hidup. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup diibaratkan seperti simbiosis mutualisme, lingkungan hidup berperan penting dalam kehidupan manusia, sedangkan manusia berperan dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup tersebut.

“Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti

memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat”.⁸

Seluruh masyarakat Indonesia dinilai berhak memperoleh hak yang adil dan setara untuk memperoleh kehidupan dan lingkungan yang baik serta sehat. Lingkungan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap orang, dan untuk itu setiap orang berkewajiban untuk menjaganya. Perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan menjamin perlindungan hukumnya agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatakan bahwa :

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan :

“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.”

Saat ini kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, yang menimbulkan penumpukan-penumpukan. Penumpukan-penumpukan ini tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungan, dan sampah yang tidak terolah dengan baik akan mencemari serta merusak keseimbangan lingkungan sekitarnya, masyarakat yang tinggal berdampingan dengan

⁸ Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

sampah tingkat kesehatannya dapat terganggu. Sehingga peran pemerintah setempat dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diperhatikan dengan baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan :

“Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan :

“Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.”

Masyarakat yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi kepada penanggung jawab yang diberikan tanggungjawab terhadap Tempat Pembuang Sampah Terpadu tersebut.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan mengenai kompensasi akibat dampak negatif dari

penanganan sampah yang buruk. Kompensasi yang dimaksud dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain. Dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang akan merugikan pihak lain yang haknya dilanggar (Pasal 1365 KUHPerdara)⁹.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada setiap masyarakat agar hak asasi manusia yang mengalami kerugian dapat terlindungi oleh hukum, sehingga menciptakan rasa aman baik secara fisik maupun pikiran.

Pelaksanaan perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu¹⁰:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah langkah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 308.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Merupakan upaya akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan perbuatan TPST Bantargebang Kota Bekasi telah menimbulkan kerugian terhadap warga sekitar.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah proses atau metode memahami sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹¹ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya kecuali jika diimplementasikan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian berupaya untuk memecahkan masalah yang muncul dalam fenomena yang relevan.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, bertujuan

¹¹ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

untuk memberikan gambaran atau penjelasan tertentu mengenai objek penelitian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek implementasi hukum positif terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Yang diteliti dalam hal ini mengenai Perlindungan hukum kesehatan bagi warga di kawasan TPST Bantargebang Kota Bekasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.¹³ Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. “Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari hasil obsevasi dalam

¹³ Rony Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

literatur, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan”.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, yang kemudian dikaji, di baca serta dipelajari dalam berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi ini. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

- e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu dalam bentuk tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin.¹⁵ Berupa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia, melalui studi pustaka akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer. Peneliti berusaha mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data

¹⁵ Rony Hanitijo Sumitro, *Op.Cit*, hlm. 94.

tambahan melalui proses wawancara (tanya jawab) dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini hendak diteliti terkait dengan data primer dan data sekunder. Dengan demikian teknik pengumpulan data penulis menggunakan cara sebagai berikut, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Yakni dengan menelusuri materi tentang hipotesis yang bersangkutan, jurnal serta dokumen lainnya yang terkait. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap buku-buku atau jurnal penting yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian lapangan adalah kegiatan wawancara berupa tanya jawab kepada narasumber guna memperoleh informasi atau data yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan tertentu berdasarkan fakta yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yakni berupa tulisan hasil investarisasi bahan hukum baik dari

perundang-undangan, buku, jurnal maupun literatur yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara, *handphone recorder*, dan *flasdisk*.

6. Analisis Data

Otje Salman S dan Anthon F. Susanto menyebutkan, “Jika analisisnya logis (dalam logika sistem hukum) dan menggunakan terminologi yang dikenal dalam bidang hukum, maka analisis itu dinggap analisis hukum”.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menyusunnya secara sistematis, sehingga masalah yang diteliti saling berkaitan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, “Analisis data yuridis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis. Analisis data ini diungkapkan oleh narasumber dalam bentuk tertulis atau perilaku nyata, dan penelitiannya tuntas, tanpa hitung-hitungan”.¹⁷

¹⁶ Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.13.

¹⁷ Rony Hanitijo Sumitro, *Op. Cit*, hlm. 98.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Lokasi penelitian dibagi menjadi, 2 yaitu:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adhiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

b. Lapangan

1. Pemukiman warga dekat TPST Bantargebang, Bekasi.
2. Kantor TPST Bantargebang Jalan Raya Narogong Pangkalan V Ciketing Udik Kota Bekasi.